



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : (021) 5730315 Faximile : (021) 5734818
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon : (0251) 8324014, 8311118

Jakarta, 11 Januari 2019

Nomor : S. 25/KSDAE/KKH/KSA.2/01/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil *Project Board Meeting* EPASS 2018

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)

Di
Tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Dewan Pengarah (*Project Board Meeting*) proyek EPASS tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan di Bogor pada tanggal 22 November 2018 dihadiri oleh Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, perwakilan dari Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas, perwakilan dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, perwakilan dari Direktorat Kawasan Konservasi, Kepala Balai Besar TN Lore Lindu, Plt Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara, Kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone, perwakilan UNDP, PMU EPASS, dan FCU EPASS di tiga lokasi proyek.
2. Rapat dipimpin oleh Direktur Pemolaan Informasi dan Konservasi Alam mewakili Direktur Jenderal KSDAE dengan agenda rapat membahas capaian target output proyek EPASS dan arahan kebijakan dewan pengarah terhadap pengelolaan proyek
3. Adapun hasil Rapat Dewan Pengarah untuk diketahui sebagai berikut
 - a) Komponen 1 Indikator 1 Tahun 2019 yang berbunyi, "Draft Peraturan pemerintah daerah tentang kawasan penyangga," diubah mengakomodasi masuknya peraturan desa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi "Draft Peraturan Pemerintah Desa tentang kawasan penyangga".
 - b) Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan proyek EPASS diperlukan penambahan tenaga pendamping lapangan pada KKM (Kelompok Konservasi Masyarakat) yang berasal dari masyarakat lokal.
 - c) Untuk mencegah perambahan baru di lokasi proyek TN Lore Lindu, Sulawesi Tengah pasca gempa, dibutuhkan konsultan *trauma healing* pada masyarakat yang terdampak gempa sebagai upaya preemtif dan preventif.
 - d) Untuk upaya menjembatani program EPASS dengan rencana strategis Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Daerah diperlukan Senior Advisor.

- e) Mengusulkan penambahan perpanjangan proyek EPASS selama 1 (satu) tahun dengan skema "tanpa penambahan biaya" karena mempertimbangkan kemungkinan sisa dana yang masih tersisa, keterlambatan awal proyek serta terjadinya bencana gempa bumi dan likuifaksi yang terjadi di lokasi proyek di TN Lore Lindu, Sulawesi Tengah yang berpengaruh pada kinerja proyek.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Ir. Wiratno, M.Sc

NIP. 19620328 198903 1 003

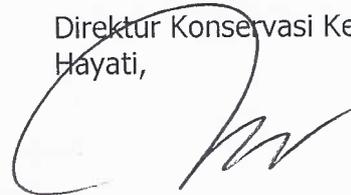
Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
3. Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu
4. Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara
5. Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Lampiran Surat Direktur Jenderal KSDAE
Nomor : S.25 /KSDAE/KKH/KSA.2/01/2019
Tanggal: 11 Januari 2019
Perihal : Hasil *Project Board Meeting* 2018

1. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE, KLHK
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, KLHK
3. Direktur Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE, KLHK
4. Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA, BAPPENAS
5. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS
6. Direktur Pinjaman dan Hibah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
7. Direktur SUPD I Ditjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
8. *Senior Management Advisor for Environment Unit* UNDP

Direktur Konservasi Keanekaragaman
Hayati,



Drh. Indra Exploitasia, M.Si
NIP. 19660618 199203 2 002